

Proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya Desa Kertorejo, Lampung Selatan

Ahmad Husnan Aksa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82565&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang terinci mengenai proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya dengan memusatkan perhatian pada peranan pemimpin dalam proses tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kasus di desa Kartorejo, Lampung Selatan. Desa yang diteliti adalah desa yang dikategorikan sebagai desa Swasembada dan pernah meraih juara dalam Lomba Desa. Pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, penelaahan dokumen dan wawancara mendalam terhadap 28 orang informan. Para informan terdiri atas pejabat pemerintah desa, pengurus LKMD, anggota LMD dan tokoh masyarakat lainnya serta penduduk biasa dan pejabat tingkat atas desa.

Pembangunan swadaya dalam penelitian ini mencakup pembangunan swadaya murni dan swadaya Inpres selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988. Selama dua tahun anggaran tersebut di desa penelitian terdapat tiga proyek pembangunan, yaitu rehabilitasi jembatan gantung di dusun C pada tahun anggaran 1986/1987 yang dilaksanakan dengan swadaya-murni masyarakat dan dua buah proyek swadaya Inpres masing-masing untuk tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988.

Dari hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan antara proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya-murni dengan swadaya Inpres. Dalam proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya murni baik pemimpin formal maupun informal mempunyai peranan penting untuk tercapainya suatu keputusan. Keputusan ditetapkan dalam rapat dusun dan pelaksanaannya mendapat dukungan dari kalangan masyarakat atas kesadaran bersama untuk kepentingan bersama. Sedangkan proses pembuatan keputusan tentang proyek pembangunan swadaya Inpres di desa penelitian selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1986/1987 dan 1987/1988 pemimpin formal (Kepala Desa) berperanan dominan dengan mengesampingkan peranan pemimpin informal, sehingga tidak melibatkan LKMD dalam perencanaannya dan musyawarah LMD dalam penetapan keputusannya. Pelaksanaan keputusan kedua proyek tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif.